

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah**

Analisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dilakukan dengan melihat konsep ideologi marhaenisme melalui fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yang meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah.

##### **3.1.1 Tinjauan Melalui Fungsi Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan proses penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Hal tersebut merupakan proses menampung pendapat atau aspirasi dari kelompok atau individu yang kemudian digabungkan dengan pendapat atau aspirasi kelompok maupun individu lain yang senada. Tahap selanjutnya setelah penggabungan kepentingan adalah mengolah kepentingan tersebut kedalam suatu rumusan yang lebih teratur, proses ini dinamakan *interest articulation*. Jadi proses agregasi dan artikulasi pendapat atau aspirasi merupakan salah satu fungsi dari partai politik.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah mengungkapkan bahwasanya dalam hal komunikasi politik, partai berpegang teguh pada Tujuh Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspirasi

Aspirasi merupakan pendapat mengenai suatu harapan dan cita-cita yang lebih baik dimasa mendatang. Aspirasi sendiri biasanya timbul lantaran adanya keresahan dari individu maupun kelompok terkait fenomena yang dihadapinya untuk kemudian setelah itu individu tau kelompok yang bersangkutan menyampaikan pandangan atau pendapatnya mengenai keadaan yang lebih baik dari apa yang dirasakanya pada saat itu. Partai politik hadir dalam menampung banyaknya aspirasi yang ada di tengah masyarakat.

Menghadapi aspirasi individu maupun kelompok yang beragam dan membawa kepentinganya masing-masing, PDI-P menerapkan skala prioritas dalam penyikapanya. Skala prioritas yang ditetapkan mengacu pada asas yang dipakai oleh PDI-P yaitu mengenai ikhtisar marhaenisme yang tertuang dalam formulasi Pancasila 1 Juni 1945.

“PDI-P Jawa Tengah akan menampung aspirasi dari siapapun dan dari manapun. Namun kita tetap memakai skala prioritas, jika ada yang mengharapkan tentang pembangunan masjid dan pihak lain ada yang mengharapkan tentang pembangunan jembatan penghubung antar desa maka PDI-P akan menempatkan pembangunan jembatan di skala yang pertama dan pembangunan masjid di skala yang kedua. Hal tersebut dilakukan lantaran dalam pandangan PDI-P jembatan penghubung antar desa akan memudahkan mobilisasi warga desa terkhusus kaum marhaen yang ada, dan pembangunan masjid tidak dihapuskan namun ditempatkan pada skala prioritas yang kedua.”<sup>1</sup>

Pernyataan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tersebut jelas menggambarkan bahwasanya fokus PDI-P dalam mensejahterakan kaum marhaen menjadi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bambang Wuryanto selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah. Jum'at 5 Oktober 2018.

titik vital garis perjuangan yang tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun dan sekaligus sebagai penentu skala prioritas langkah politik yang akan diambil.

## 2. Agregasi

Inti dari proses ini adalah dimana aspirasi yang beragam macamnya kemudian digabungkan kedalam kepentingan-kepentingan yang senada. Proses agregasi kepentingan ini dalam PDI-P Jawa Tengah dilakukan oleh pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah. Didalamnya musyawarah dikedepankan sebagai jalan yang ditempuh dalam proses penggabungan kepentingan.

## 3. Artikulasi

Setelah aspirasi yang ada melalui proses penggabungan maka selanjutnya aspirasi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur yang muaranya adalah pada usul kebijakan, hal ini merupakan hakikat dari proses artikulasi yang dijalankan partai politik. Menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, aspirasi yang telah terumuskan dalam bentuk kebijakan partai diserahkan sepenuhnya kepada para kader partai yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk materialisme ideologi dimana kebijakan internal partai kemudian dieksternalisasikan menjadi kebijakan pemerintah agar dampaknya bisa secara langsung dan mengikat pada masyarakat Jawa Tengah. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika para kader yang duduk di parlemen Jawa Tengah tidak mengetahui bahwasanya kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan di parlemen adalah materialisme dari ideologi yang dipakai.

“...Saya menjalankan apa yang sekiranya pak ketua perintah, seandainya tidak ada perintah apapun ya kami selaku DPRD kebanyakan hanya menyesuaikan apa yang ada di pusat saja dalam hal peraturan.”<sup>2</sup>

Jika ditinjau dari orientasi politik yang dimiliki kader, maka orientasi yang ada dalam hal artikulasi kepentingan ini baru sampai ditahap orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap objek-objek politik yang ada di sekitarnya. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang kepercayaan politik, peranan-peranan politik, pemegang peranan politik tersebut dan segala kewajibannya serta input-input dalam sistem politik dan outputnya. Individu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sistem politik bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik, kebijakan terkini, dan sebagainya.

#### 4. Edukasi

Fungsi partai yang keempat ini berkaitan dengan Pendidikan ideologi dan organisasi. Pendidikan tersebut bersifat internal dan eksternal. Menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah dalam hal ideologi dan organisasi menjadi konsusmsi internal namun partai juga memiliki kewajiban untuk membumikan ajaran partai sesuai apa yang diamanatkan dalam piagam perjuangan partai, maka fungsi edukasi juga ada yang bersifat eksternal.

#### 5. Rekrutmen

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sarei Abdul Rosyid selaku anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Bertempat di Kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah. Senin, 24 September 2018.

Fungsi rekrutmen yang dijalankan PDI-P Jawa Tengah berkaitan dengan suksesi di internal DPD, suksesi kader-kader yang mengisi jabatan pemerintahan dan rekrutmen bagi anggota PDI-P sendiri. Adapun pola rekrutmen yang dijalankan PDI-P Jawa Tengah menurut penuturan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah melalui organ sayap PDI-P Jawa Tengah yang meliputi Parmusi, Repdem dan Taruna Merah Putih.

#### 6. *Electoral*

Fungsi ini tidak terlepas dari tujuan khusus yang dimiliki PDI-P yakni berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional melalui Pemilu sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

#### 7. *Budgeting*

Partai menjalankan fungsi anggaran guna memenuhi kebutuhan rumah tangga partai dan kebutuhan lainnya yang tidak terduga. Adapun menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, anggaran yang didapat DPD PDI-P dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga organisasinya sebagian besar disokong oleh dana iuran pengurus DPD itu sendiri.

---

<sup>3</sup> AD/ART PDI-P Hasil Kongres IV

Dari hasil pemaparan tentang Tujuh Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka yang terdapat tiga poin yang berkaitan erat dengan fungsi komunikasi politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah. Ketiga hal tersebut adalah fungsi aspirasi, fungsi agregasi dan fungsi artikulasi. Penekanan aspek ideologi sangat dijunjung oleh ketua DPD PDI-P namun anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah rata-rata hanya memahami apa yang menjadi instruksi ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa memahami secara mendalam konteks ideologi yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diperjuangkan di ranah legislatif. Sehingga usaha dalam mematerialisasikan ideologi partai ke dalam kebijakan pemerintahan Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan dan perlu proses yang ekstra. Karena partai harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemahaman anggota fraksi yang minim dalam aspek ideologi dan mereka cenderung hanya berfokus pada pragmatisme politik.

Pragmatisme politik yang dimaksud adalah orientasi anggota fraksi dalam bergerak hanya untuk mempertahankan kursi yang telah didapat di parlemen, terlebih menyongsong Pemilu 2019. Orientasi ideologi dalam hal ini seolah tergeser karena mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak memiliki *urgensitas* yang tinggi.

### **3.1.2 Tinjauan Melalui Fungsi Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik dapat difahami sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap suatu fenomena politik dimana seseorang

tersebut berada. Sosialisasi politik juga dapat difahami sebagai jalan dimana seseorang dapat menyampaikan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena sosialisasi politik merupakan elemen penting bagi terbentuknya budaya politik.

Dalam partai politik, sosialisasi berlangsung seumur hidup dan terkemas dalam proses kaderisasi. PDI-P Jawa Tengah dalam hal kaderisasi memiliki bidang tersendiri yakni Bidang Ideologi dan Kaderisasi yang masuk dalam struktur kepengurusan. Namun terjadi kekosongan lantaran Wakil Ketua bidang yang bersangkutan wafat dan belum ada penggantinya. Untuk itu fungsi ideologi dan kaderisasi penulis tinjau dari badan partai di DPD PDI-P Jawa Tengah yakni BADIKLATDA (Badan Pendidikan dan Pelatihan tingkat Daerah). BADIKLATDA sendiri merupakan badan partai yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pembentukan kader, serta Pendidikan dan Pelatihan kader sesuai penugasan tertentu. Melalui badan partai yang dimiliki DPD PDI-P Jawa Tengah tersebut fungsi sosialisasi politik khususnya melalui jalan Pendidikan politik.

Menurut Harry Fadhilah selaku anggota dari BADIKLATDA menyampaikan bahwasanya:

“Pendidikan politik itu usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan ideologi partai maupun politik lainnya kepada pengurus, kader dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, hak serta kewajibanya.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Harry Fadhilah selaku anggota BADIKLATDA DPD PDI-P Jawa Tengah. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah (Panti Marhaen). Jumat, 5 Oktober 2018.

Hal tersebut senada dengan Pasal 31 UU No 28 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pada setiap partai politik untuk melakukan Pendidikan politik kepada pengurus, kader partai maupun kepada masyarakat.

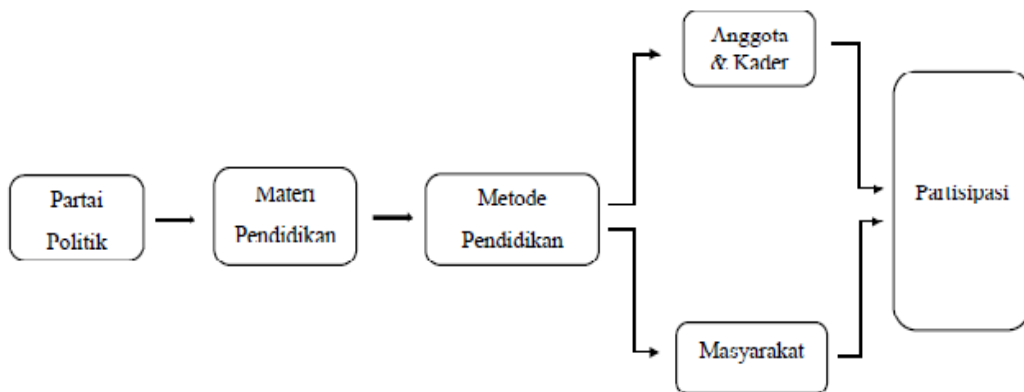
Menurut pengurus BADIKLATDA DPD PDI-P Jawa Tengah, untuk materi Pendidikan politik yang disampaikan pada masyarakat yakni mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara serta konstelasi yang terjadi. Sedangkan materi Pendidikan politik yang disampaikan kepada kader PDI-P Jawa Tengah yakni lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kader agar berfikir progresif serta tentunya pemantapan ideologi yang dianut. Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pendidikan politik bagi anggota maupun kader bertujuan meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan serta sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan ideologis anggota dan kader.



**Gambar 3.1**

**Bagan Alur Pendidikan Politik Oleh Partai Politik**



Berdasarkan bagan yang ada di atas, maka output dari Pendidikan politik yang dilakukan baik di internal partai maupun eksternal adalah adanya partisipasi sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Sesuai dengan AD/ART PDI-P, Pendidikan politik yang dilakukan merupakan komponen dari sistem kaderisasi partai. Sistem kaderisasinya sendiri terbagi dalam kaderisasi partai dan sekolah partai. kaderisasi partai dilakukan secara berjenjang dan terpadu dibawah pengawasan DPP partai. jenjang kaderisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Kader tingkat Pratama, dilaksanakan oleh DPC partai dan melaporkannya pada DPD partai
2. Pendidikan Kader tingkat Madya, dilaksanakan oleh DPD partai dan melaporkannya pada DPP partai

3. Pendidikan Kader tingkat Utama, dilaksanakan oleh DPP partai

Adapun yang dimaksud sekolah partai adalah dibentuk guna melaksanakan Pendidikan politik dan Pendidikan kebangsaan. Tujuan dari sekolah partai yaitu :

1. Membentuk kader partai yang memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik dan kesadaran lingkungan serta pemahaman terhadap aspek social ekonomi kemasyarakatan.
2. Mendidik, mencerdaskan dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa dan negara.
3. Menanamkan ajaran-ajaran Sukarno.

Namun sejauh ini dua metode Pendidikan yang telah dikonsepsikan belum berjalan secara maksimal terutama untuk Pendidikan pada masyarakat secara umum. PDI-P Jawa Tengah lebih banyak memfokuskan pada Pendidikan anggota dan kader, terlebih menyongsong tahun politik 2019 partai lebih sering melakukan Pendidikan politik bagi para calon anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun provinsi.

“silabus kaderisasi telah dibukukan, border untuk masing masing materi jelas didalamnya. Tantangan datang dari dua hal, pertama adalah bagaimana menyesuaikan ideologi yang sifatnya konseptual dengan realita yang ada saat ini. Tantangan kedua adalah mengenai dana. proses Pendidikan politik dalam konteks kaderisasi partai sering terhambat dan bahkan tidak dilaksanakan lantaran keterbatasan dana.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

Memateriilkan ideologi partai agar sesuai dengan konsep ruang dan waktu saat ini dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi DPD PDI-P Jawa Tengah dalam penerapannya di materi Pendidikan politik bagi internal partai. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perlu usaha lebih dalam memateriilkan ideologi partai politik. Pemahaman anggota dan kader sejauh inipun masih sebatas pada meyakini bahwa PDI-P adalah partai nasionalis namun tidak mengetahui nasionalis seperti apa yang dibawa oeh partai. tantangan lain adalah datang dari sumber pendanaan bagi Pendidikan politik PDI-P di Jawa Tengah yang terbatas, akibatnya banyak agenda kaderisasi yang terpaksa dilewatkan.

### **3.1.3 Tinjauan Melalui Fungsi Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kepemimpinan karena partai sebagai organisasi politik memiliki peran yang besar dalam mencetak pemimpin yang berkualitas tersebut. Seleksi kepemimpinan yang dilakukan baik untuk internal maupun eksternal partai. Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas baik dalam sisi ideologi maupun organisasi. Hal tersebut dikarenakan kader yang berkualitas menjadikan partai tidak sulit dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Peluang untuk mengajukan calon dalam kepemimpinan dijabatan pemerintahanpun semakin lebar, baik untuk tingkat daerah maupun nasional.

Selain guna rekrutmen internal dan eksternal, partai politik juga mempunyai kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak anggotanya. Sehingga

rekrutmen dapat menjamin kelangsungan hidup bagi partai politik terkait. Anggota yang direkrut kemudian dididik dan ditempa agar menjadi kader yang berkualitas sehingga seleksi kepemimpinan internal dan eksternalpun tidak sulit untuk dilakukan. Adapun salah satu upaya dalam menciptakan kader berkualitas dalam PDI-P adalah melalui Pendidikan politik yang telah disebutkan dipoin pembahasan sebelumnya.

PDI-P Jawa Tengah melakukan rekrutmen untuk memperbanyak anggota melalui sayap-sayap partai yang ada.

“...sejauh ini dalam hal rekrutmen yang paling massif melalui komunitas juang dengan menempa para generasi muda. Sayap partai yang lainnya ada, seperti Repdem, Taruna Merah Putih dan BMI, cuman tidak semasih komunitas juang di Jawa Tengah.”<sup>6</sup>

Melalui komunitas juang tersebut pematapan ideologi dan organisasi dilakukan, dengan harapan para generasi muda yang ada didalamnya dapat melanjutkan estafet kepemimpinan PDI-P Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah sendiri menurut penuturan Ketua DPD PDI-P, Pendidikan dalam komunitas juang dilakukan dengan sistem *mentoring* oleh masing-masing guru kader, adapun aspek yang dikedepankan adalah pengajaran tentang nilai-nilai ajaran Sukarno serta aspek keorganisasian.

Pendidikan yang dilakukan pada generasi muda yang tergabung dalam komunitas juang harapanya dapat mencetak kader partai yang berkualitas secara ideologi dan kaderisasi, karena menurut pemaparan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah

---

<sup>6</sup> Op.Cit. Hlm.77

kader partai yang saat ini berproses rata-rata mengesampingkan nilai ideologi dan organisasi ketika dibenturkan dengan kepentingan pribadi. Karena angkatan pertama komunitas juang Jawa Tengah dilantik pada tahun 2014 lalu, maka diharapkan untuk sepuluh tahun mendatang PDI-P sudah memiliki kader partai yang ideologis dan organisatoris sehingga rekrutmen internal dan eksternal semakin berkualitas.

Temuan lain yang berhubungan dengan aspek rekrutmen internal organisasi di tubuh DPD PDI-P Jawa Tengah adalah mengenai proses restrukturisasi DPD PDI-P Jawa Tengah tahun 2015. Proses restrukturisasi tersebut diatur dalam Surat Ketetapan Partai Nomor : 066/TAP/DPP/XI/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang dan Konferensi Daerah PDI-P serta Surat Ketetapan Partai Nomor 067/TAP/DPP/XI/2014 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua PAC, DPC dan DPD PDI-P. Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap mekanisme penjaringan ketua DPD PDI-P melalui forum Konferensi Daerah Jawa Tengah. Keterkaitan aspek ideologi dalam proses restrukturisasi tersebut tercermin dalam mekanisme penjaringan calon ketua DPD dan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam dua Surat Ketetapan Partai yang telah disebutkan di atas. Dalam hal penjaringan calon ketua DPD kriteria yang harus dipenuhi adalah ideologi, pengabdian di partai dan komitmen dalam membangun partai (Pasal 14 Surat Ketetapan Partai Nomor 067/TAP/DPP/XI/2014). Secara praktik aspek ideologi calon ketua DPD dilihat dari serangkaian tes terkait hal-hal ideologi yang harus dilakukan oleh calon ketua, adapun tes tersebut adalah diselenggarakan oleh DPP partai. Aspek lain adalah

mengenai mekanisme pengambilan keputusan, partai mengedepankan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan tidak boleh melakukan voting dalam kondisi apapun (Pasal 24 Surat Ketetapan Partai Nomor 066/TAP/DPP/XI/2014). Hal tersebut menegaskan komitmen PDI-P dalam memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.

#### **3.1.4 Tinjauan Melalui Fungsi Pengaturan Konflik**

Sejatinya partai politik bukan hanya bergerak untuk internal partainya sendiri, namun adanya partai politik diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat pula. Singkatnya adalah partai diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung psikologis maupun organisasional antara masyarakat dan pemerintahan.

Berbicara tentang konflik maka akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral akan memunculkan banyak kepentingan yang saling berbenturan, hal ini membawa dampak destruktif ketika dibiarkan. Konflik dalam masyarakat tidak bisa dihilangkan tetapi harus dilakukan upaya manajemen konflik supaya konflik yang ada tidak menimbulkan disintegrasi.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Sebelum bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi, tentunya partai harus mengetahui terlebih dahulu konflik yang ada. PDI-P Jawa Tengah lebih banyak menitikberatkan pada kerja kader-kadernya di parlemen Jawa Tengah dalam hal identifikasi dan pengaturan konflik.

“...urusan itu sepenuhnya nanti diserahkan pada kader-kader di parlemen karena merekakan berasal dari dapil-dapil yang ada di Jawa Tengah jadi diharapkan mampu untuk mengidentifikasinya. Adapun penyelesaiannya nanti dibahas dulu dipartai, setelah itu baru dibawa lagi di meja parlemen. Ya sejalan dengan fungsi aspirasi, agregasi dan artikulasi.”<sup>7</sup>

Porsi yang lebih besar diberikan pada kader yang ada diparlemen Jawa Tengah membuat proses identifikasi permasalahan kurang maksimal karena rata-rata kader yang duduk diparlemen memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi permasalahan yang harus diprioritaskan PDI-P, tentunya yang sesuai dengan asas perjuangan partai. hal tersebut terjadi lantaran pemahaman ideologi para kader yang ada di parlemen minim. Karena hal tersebut maka upaya partai dalam pengaturan konflik yang ada dimasyarakat kurang maksimal.

---

<sup>7</sup> Op.Cit. Hlm.77

## **3.2 Pemahaman Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan**

Tujuan dari pembahasan adalah untuk menjelaskan pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan ditinjau dari orientasi yang dimiliki, meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

### **3.2.1 Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan**

Pembahasan dalam sub bab ini berkaitan dengan orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi kognitif berkaitan dengan kesadaran serta pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

Pemahaman tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dimiliki oleh setiap kader dan anggota, dimana masing-masing dari mereka menyadari bahwa nilai marhaenisme merupakan acuan partai menentukan langkah gerak dalam usaha pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Masing-masing kader dan anggota di DPD PDI-P Jawa Tengah memahami bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan nilai marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila 1 Juni 1945. Intisari tersebut termuat dalam prinsip marhaenisme yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan YME.



Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah meyakini bahwa perjuangan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan *wong cilik*, atau dalam konsep marhaenisme sering disebut dengan kaum marhaen. Menurut hasil rumusan kongres Partindo yang dilaksanakan di Mataram pada tahun 1930, kaum marhaen adalah kaum proletar, tani melarat dan kaum melarat Indonesia lainnya. Jadi perjuangan yang diyakini untuk tercapainya kesejahteraan bagi *wong cilik* adalah sejahteranya rakyat Indonesia yang selama ini tertindas oleh sistem dan hidup dalam garis kemiskinan.

Tidak terdapat perbedaan dalam konteks orientasi kognitif antara kader dan anggota. Status kader dan anggota yang dimiliki oleh individu dalam DPD PDI-P Jawa Tengah dibedakan dari kaderisasi formal yang telah dilaksanakan. Status kader diperoleh ketika anggota telah melaksanakan pendidikan kader tingkat pertama sedangkan status anggota adalah ketika individu masuk dalam rekrutmen awal partai untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Materi yang didapat dalam proses Pendidikan kader tingkat pertama memang lebih banyak dari rekrutmen anggota di awal, namun dalam kader dan anggota keduanya meyakini bahwa perjuangan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan *wong cilik* dan rakyat Indonesia pada umumnya.

“Perjuangan yang dilakukan PDI-P ya untuk membuat para masyarakat Indonesia terutama rakyat miskin untuk hidup dalam kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pegangan partai.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bambang Hariyanto Baharudin selaku pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah periode pertama hingga saat ini tahun 2018. Bertempat di Kantor Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Senin, 10 September 2018.

“Saya yang duduk di DPRD Jawa Tengah selalu menjalankan perintah ketua untuk mendahulukan kepentingan wong cilik, Saya menjalankan perintah tersebut karena tahu PDI-P berjuang untuk hal itu.”<sup>9</sup>

Pernyataan pertama disampaikan oleh sekretaris fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dengan status sebagai kader dan pernyataan kedua disampaikan oleh anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dengan status sebagai anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Keduanya menyampaikan keyakinan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan *wong cilik* merupakan suatu keharusan dan keduanya meyakini bahwa apa yang menjadi dasar perjuangan partai merupakan acuan bergerak dalam upaya pencapaian kesejahteraan tersebut.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah mengetahui bahwa marhaenisme tidak tertulis secara eksplisit menjadi ideologi partai namun yang diambil adalah nilai-nilai dari konsep marhaenisme. Ditinjau dari aspek sejarah, hal tersebut terjadi lantaran konstelasi politik pada masa orde baru yang menyajikan realita adanya desukarnoisasi sehingga marhaenisme tidak tertulis secara eksplisit menjadi ideologi partai. Adanya orientasi kognitif menyebabkan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyadari bahwa marhaenisme merupakan dasar perjuangan partai.

### **3.2.2 Sikap dan Perasaan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan**

Pembahasan ini berkaitan dengan orientasi afektif, dimana orientasi afektif berkaitan dengan perasaan serta sikap kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah

---

<sup>9</sup> Op.Cit. Hlm.78

terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah meyakini dan mendukung upaya pencapaian tujuan partai dengan menggunakan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Namun dukungan tersebut diwujudkan kader dan anggota dalam bentuk mematuhi perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena mereka meyakini bahwa apapun yang diperintahkan adalah berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam dasar perjuangan partai.

Tinjauan tersebut dilakukan pada kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang menjabat sebagai anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan lantaran kader dan anggota yang duduk di parlemen Jawa Tengah merupakan petugas partai yang banyak diberikan tugas untuk mematerialisasikan apa yang menjadi ideologi partai melalui meja parlemen. Harapannya adalah bentuk kongkret marhaenisme dapat menjangkau secara keseluruhan dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Tengah dalam bentuk kebijakan atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di Jawa Tengah.

“...kami sebagai petugas partai yang duduk di DPRD Jawa Tengah percaya bahwa langkah gerak partai melalui parlemen sudah dikonsepsikan oleh ketua termasuk dalam usaha pengejawantahan marhaenisme. Jadi sudah menjadi tugas kami untuk menjalankan apa yang diperintahkan sebagai bentuk usaha pencapaian tujuan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Op.Cit. Hlm.78

Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk dukungan kader dan anggota terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan tercermin dalam kepatuhan pada segala perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya ikatan emosional yang terbentuk adalah antara kader dan anggota dengan pimpinanya bukan dengan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Hal yang penting untuk digaris bawahi adalah kader dan anggota memiliki pengetahuan tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya saja ikatan emosional yang terbentuk dalam konteks kerja struktural organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah dimana mereka mematuhi segala perintah ketua.

### **3.3.3 Kombinasi Nilai dan Tindakan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan**

Pembahasan ini berkaitan dengan orientasi evaluatif yang dimiliki oleh kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Orientasi evaluatif berkaitan dengan keputusan dan pendapat tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dengan melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi evaluatif berbicara tentang individu yang memahami betul dasar perjuangan partai, mengetahui tindakan dalam konteks materialisasi nilai-nilai perjuangan, mengetahui konteks ruang dan waktu dalam materialisasi nilai perjuangan sehingga yang demikian menyebabkan individu tersebut terlihat aktif dalam perjuangan partai.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah hanya sebatas mengetahui bahwa nilai marhaenisme menjadi dasar perjuangan partai. Nilai marhaenisme yang mengalir dalam setiap gerak partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno tidak diimbangi dengan wujud kongkret nilai tersebut dalam suatu tindakan dari masing-masing kader dan anggota.

Tindakan dalam upaya materialisasi dasar perjuangan lebih banyak dilakukan melalui perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa menelaah lebih dalam konteks perintah yang dijalankan. Hal tersebut membuktikan bahwa orientasi evaluatif belum sepenuhnya dimiliki oleh para kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah.

Orientasi evaluatif mengarah pada materialisasi ideologi sesuai konteks ruang dan waktu, hal ini penting dilakukan lantaran latar belakang lahirnya marhaenisme sebagai dasar perjuangan berbeda dengan latar saat ini. Marhaenisme sebagai seperangkat nilai tidak berubah, namun implementasi kongkret dari nilai tersebut harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi saat ini. Kesadaran kader dan anggota untuk berfikir kearah materialisasi marhaenisme sesuai konteks ruang dan waktu tidak ada karena orientasi yang terbentuk sebatas mereka mengetahui bahwa marhaenisme merupakan dasar perjuangan partai.

### **3.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah**

Identifikasi hambatan yang ada dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan melihat hambatan tersebut pada setiap elemen penyusun ideologi partai politik sebagai suatu organisasi, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi baru terhadap penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah. Adapun elemen penyusun ideologi partai politik sebagai suatu organisasi yang akan dibahas meliputi visi dan misi, tujuan antara, struktur organisasi serta materialisasi ideologi politik.

#### **3.3.1 Visi dan Misi DPD PDI-P Jawa Tengah**

Visi yang dimiliki oleh suatu partai politik merupakan tujuan jangka panjang partai politik terkait. Visi merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh partai politik. Hal tersebut menjadi unsur yang sangat penting karena masyarakat harus diberi gambaran dan kepastian tentang finalisasi perjuangan partai politik. PDI-P sebagai suatu partai politik di Indonesia memiliki visi yang termaktub dalam AD&ART partai, visi tersebut adalah “Mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Sejalan dengan misi partai yang merupakan alasan mengapa organisasi partai politik itu ada, partai politik secara teoritik didirikan guna memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat. Sehingga memberikan kejelasan

institusional atas perjuangan dan aspirasinya, adapun misi yang dimiliki oleh PDI-P itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera, berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
3. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
4. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
5. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

6. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal visi dan misi partai tidak ada perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainya karena sejatinya antar daerah merupakan satu kesatuan. Masing-masing struktur kepengurusan ditiap daerah yang sifatnya berjenjang dari anak ranting sampai pusat ada sebagai fungsi struktural partai yang memudahkan komunikasi dan alur kordinasi.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah menyampaikan bahwa yang menjadi pembeda adalah visi dan misi masing-masing ketua DPD yang dibawa ditiap kepengurusan. Jadi dalam hal ini berbicara tentang visi misi kepengurusan bukan mengenai visi misi partai politik. Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah dalam kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020 membawa visi “Jawa Tengah mantap ideologi dan mantap organisasi.” Adapun misi yang dibawa sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang ada menurut penuturan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

“Jawa Tengah ini harus jadi daerah yang mantep ideologi dan organisasi, mantep ideologi saja tidak cukup karena PDI-P adalah suatu organisasi politik. Jadi pertama harus menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, lalu kader Jawa Tengah tidak boleh anti simbol-simbol perjuangan PDI-P dan yang terakhir pengurus harus tertib organisasi.”<sup>11</sup>”

---

<sup>11</sup> Op.Cit. Hlm.77



Menurut Bambang Wuryanto selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, tiga poin yang menjadi misinya dalam kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020 adalah :

1. Menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan kaidah nilai-nilai perjuangan PDI-P
2. Membuat kader PDI-P bangga terhadap simbol-simbol perjuangan PDI-P
3. Menciptakan iklim tertib organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah

Jika dilihat dari visi dan misi yang dibawa oleh Bambang Wuryanto dalam kepengurusan maka iklim yang berusaha diciptakan dalam DPD PDI-P Jawa Tengah adalah iklim organisasi yang baik berlandaskan pada nilai-nilai perjuangan PDI-P. Sedangkan yang menjadi visi dan misi partai politik dalam hal ini PDI-P adalah apa yang disampaikan oleh ketua umum PDI-P.

Hambatan dalam pelaksanaan visi “Mantep Ideologi dan Mantep Organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kader dan anggota yang belum memiliki orientasi evaluatif tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi yang dimiliki adalah kognitif sehingga kader dan anggota hanya sebatas mengetahui marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Sementara itu, mantap ideologi yang dibawa oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah berusaha menciptakan kondisi dimana kader dan anggota memahami betul dasar perjuangan partai, mengetahui tindakan dalam konteks materialisasi nilai-nilai perjuangan dan mengetahui konteks ruang dan waktu dalam materialisasi nilai perjuangan. Perubahan orientasi

dari kognitif ke evaluatif menjadi harapan dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan DPD PDI-P Jawa Tengah

### **3.3.2 Tujuan Antara DPD PDI-P Jawa Tengah**

Tujuan antara berfungsi sebagai perantara atas tahapan-tahapan partai dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tujuan jangka panjang perlu diterjemahkan ke dalam tujuan antara agar memudahkan dalam pengukuran pencapaian dari tujuan jangka Panjang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penuturan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, dalam kepengurusannya tidak memiliki tujuan antara. Fokus ditunjukkan bagi pencapaian tujuan partai secara umum. Sedangkan untuk visi dan misi kepengurusan dijalankan sesuai dengan konsensus-konsensus yang telah ditetapkan diawal kepengurusan.

Melihat pada konsep tujuan antara maka tidak adanya tujuan antara dalam langkah gerak organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian visi yang dibawa Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

### **3.3.3 Struktur Organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah**

Struktur organisasi partai politik mencerminkan beberapa hal. Pertama, struktur organisasi mencerminkan pembagian kerja dan aktivitas dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, di dalamnya aktivitas yang kompleks dibagi dalam bidang-bidang sehingga memudahkan alur kordinasi dan spesialisasi pekerjaan di

dalamnya. Kedua, struktur organisasi partai politik menjelaskan interaksi antar bidang dan manusia di dalamnya. Jalur komunikasi, sistem pelaporan, garis komando dan mekanisme pengambilan keputusan merupakan contoh mekanisme interaksi yang terjadi dalam struktur organisasi partai politik. Ketiga, struktur organisasi partai politik bercerita tentang *job description* dan *job specification*. *Job description* menggambarkan aktivitas dan aksi yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam masing-masing bidang. *Job specification* adalah menjelaskan mengenai kemampuan, *skill* dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengisi masing-masing bidang.

Keterkaitan antara aspek ideologi PDI-P dengan struktur organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah bisa dilihat dari cara mengelompokkan tugas dan pekerjaan. Selain, itu tugas dan pekerjaan yang ada dalam struktur organisasi tersebut biasanya akan mencerminkan ideologi partai politik yang bersangkutan. Adapaun komposisi struktur pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi
4. Wakil Ketua Bidang Organisasi
5. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik
7. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Keamanan
8. Wakil Ketua Bidang Maritim
9. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

10. Wakil Ketua Bidang Ekonomi
11. Wakil Ketua Bidang Buruh
12. Wakil Ketua Bidang Tani
13. Wakil Ketua Bidang Nelayan
14. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak
15. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
16. Wakil Ketua Bidang Komunitas dan Seni Budaya
17. Wakil Ketua Bidang Pariwisata
18. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
19. Sekretaris
20. Wakil Sekretaris Bidang Internal
21. Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
22. Bendahara
23. Wakil Bendahara

Marhaenisme yang menjadi nilai ideologis PDI-P tercermin dalam pembagian tugas di bidang-bidang struktur kepengurusan. Marhaenisme sendiri secara konsep merupakan sebuah ideologi perjuangan yang mengangkat masalah penghisapan dan penindasan rakyat kecil yang terdiri dari kaum tani miskin, petani kecil, buruh miskin, pedagang kecil dan kaum melarat Indonesia lainnya yang dilakukan oleh kapitalis, tuan tanah, rentenir dan golongan-golongan penghisap lainnya<sup>12</sup>. Aspek ideologi dalam struktur kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah tercermin dari adanya Bidang Buruh, Bidang Tani dan Bidang Nelayan. Namun

---

<sup>12</sup> Sukarno. 2005. *Di bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno), hlm. 253

yang menarik adalah pada keberjalanan kepengurusan bidang-bidang tersebut yang menjadi ciri ideologinya belum melakukan kerja-kerja kongkret sesuai spesifikasi bidangnya masing-masing. Para wakil ketua bidang tersebut mengedepankan kerja kolektif dan cenderung mengesampingkan *job description* dan *job specification*. Hal lain yang menjadi hambatan dalam optimalisasi kerja struktur organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia ditiap bidang, bidang-bidang yang ada hanya diisi oleh satu Wakil Ketua Bidang yang terkait tanpa anggota bidang di dalamnya. Keputusan bidang diambil oleh satu orang Wakil Ketua Bidang, sehingga tidak ada penyeimbang didalam bidang-bidang tersebut.

#### **3.3.4 Materialisme Ideologi Politik**

Ideologi politik bersifat abstrak dan konseptual, sementara permasalahan yang dihadapi masyarakat bersifat riil dan butuh penyelesaian dengan cepat. Karenanya, mengkomunikasikan ideologi politik berarti harus mampu menerjemahkan ideologi tersebut ke dalam hal-hal yang sifatnya materiil dan bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami ideologi yang sifatnya kompleks, filosofis dan abstrak. Tanpa wujud riil dari ideologi maka ideologi tersebut hanya akan menghadirkan kebingunan dan membuka interpretasi yang beragam di masyarakat. Dengan demikian, materialisme ideologi partai politik menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan, adapun beberapa hal yang

bisa dilakukan dalam materialisme ideologi politik adalah yang akan dijelaskan di bawah ini:

### **1. Platform Partai**

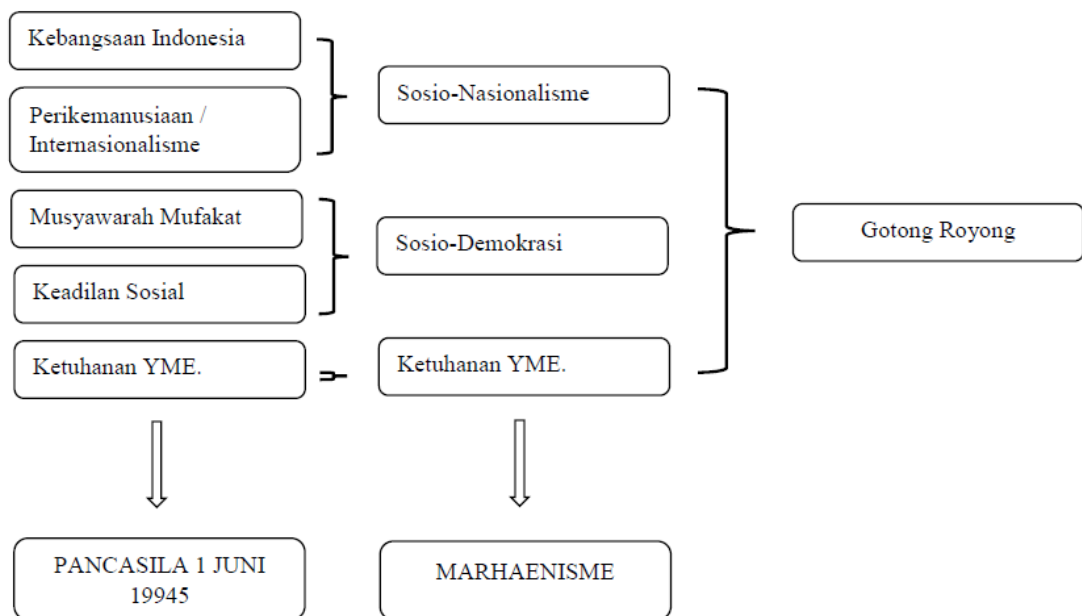
*Platform* partai menjadi salah satu bentuk materialisme ideologi politik, *platform* partai sendiri berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dalam koridor bangsa dan negara. *Platform* partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan hal-hal yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti program kerja maupun isu politik. Di dalamnya seluruh sistem nilai dan norma diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang bersifat kongkret. *Platform* partai juga bisa dilihat sebagai *spirit* dari partai politiknya. Selain itu, *platform* partai juga berisikan komitmen partai politik dalam menjalankan roda organisasi serta apa yang ingin dikontribusikan pada masyarakat. *Platform* partai juga berisikan hal-hal yang sifatnya fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik.

PDI-P memiliki tujuan yakni mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara eksplisit yang menjadi asas PDI-P adalah Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Singkatnya secara tertulis Pancasila 1 Juni 1945 menjadi asas PDI-P. Adapun nilai yang menjiwai asas tersebut akan penulis jelaskan dalam skema gambar di bawah ini.

**Gambar 3.2**

**Asas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**



Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang secara tertulis dijadikan asas perjuangan oleh PDI-P adalah rumusan sila dari Sukarno. Hal tersebut senada dengan komitmen PDI-P untuk selalu membumikan ajaran Sukarno sebagai *Founding Father*. Adapun intisari dari gambar mengenai ideologi PDI-P di atas adalah sesuai dengan apa yang di sampaikan Sukarno di forum sidang *Dokutitsu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

“...Dasar-dasar negara telah Saya usulkan. Lima bilanganya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik, simbolik angka pula. Rukun islam lima jumlahnya, jari kita lima setangan, kita mempunyai panca indera. Apa lagi yang lima bilanganya? (seorang yang hadir menjawab : Pandawa Lima)

Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilanganya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli Bahasa Namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Bilangan lima itu Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada Saya. Saudara-saudara bertanya pada Saya, apakah perasan yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah Saya fikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *Weltanschauung* kita.

Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, Saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu Saya namakan *Socio-Nationalism*. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke* dengan kesejahteraan, Saya peraskan pula menjadi satu : inilah yang dulu Saya namakan *Socio-Democratie*. Tinggal lagi Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga : *Socio-Nationalism*, *Socio-Democratie* dan Ketuhanan. Kalau Tuan suka dengan simbolik tiga maka ambilah yang tiga ini. Tetapi bila semua tuan-tuan tidak senang dengan Trisila ini, dan minta satu, satu dasarnya saja? Baiklah. Saya jadikan satu, Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Yaitu Gotong Royong.”<sup>13</sup>

Jadi, konsep sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan lebih dulu lahir dari konsep Pancasila 1 Juni 1945. Tiga butir tersebut yang dinamakan dengan Trisila merupakan inti dari Marhaenisme yang digagas oleh Sukarno. Kedudukan marhaenisme dalam perjuangan PDI-P menjadi sangat vital, karena konsep tersebut merupakan inti dari asas Pancasila 1

---

<sup>13</sup> Pidato Sukarno dalam Forum BPUPKI, Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945



Juni 1945. Asas tersebut bersifat fundamental dan menjadi *spirit* perjuangan politik maka secara jelas *platform* PDI-P tertuang dalam ikhtisar marhaenisme seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal yang perlu difahami adalah bahwasanya ideologi partai politik yang tercermin dalam *platform* partai bukanlah aksesoris organisasi semata, tetapi perlu diejawantahkan dalam kegiatan fisik sehari-hari. Perilaku para politisi partai politikpun idealnya perlu mengacu pada *platform* partai yang telah disepakati bersama.

Menurut Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Tengah, bentuk tindakan politis partai dalam pencapaian kekuasaan melalui jalan Konstitusional dan Demokratis, jalan tersebut merupakan bentuk praksis dari ideologi PDI-P sendiri.

“Para kader maupun anggota PDI-P di Jawa Tengah itu harus faham kalau pencapaian kekuasaan itu harus lewat jalan konstitusional dan demokratis. Karena itulah wujud kongkret dari ideologi sebagai alat perjuangan partai. Apalagi ketua DPD yang sekarang sangat mengedepankan aspek ideologi dalam kerja organisasi jadi tidak bisa asal babad alas dalam pencapaian kekuasaan. Meskipun dua jalan itu susah dan butuh perjuangan ekstra namun itulah yang seharusnya dilakukan PDI-P khususnya PDI-P Jawa Tengah.”<sup>14</sup>

Pencapaian kekuasaan melalui jalan konstitusional yang dimaksud adalah bahwasanya PDI-P Jawa Tengah dalam usaha pencapaian kekuasaannya menempuh jalan-jalan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia dengan tentunya dengan mengacu aturan hokum tertinggi

---

<sup>14</sup> Op.Cit. Hlm.92

yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalan demokratis yakni sifatnya demokrasi dimana persamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan dalam masyarakat menjadi *value* yang dikedepankan.

## **2. Isu Politik**

Isu politik adalah berbeda dari *platform* politik, isu politik ini berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah partai politik harus terus menerus memperbarui data dan informasi tentang kondisi yang tengah dihadapi masyarakat. Dalam hal ini kegusaran, keresahan maupun kekecewaan akan suatu hal harus mampu ditangkap oleh partai politik untuk kemudian dituangkan dalam isu politik.

Struktur pengurus PDI-P Jawa Tengah memiliki bidang yang terbilang lengkap dari beberapa aspek dan dapat menggambarkan platform perjuangan dari partai itu sendiri. Namun bidang-bidang yang ada rata-rata tidak mempertimbangkan apa yang menjadi TUPOKSI nya serta cenderung mengesampingkan kerja-kerja struktural dan fungsional. Identifikasi permasalahan masyarakat diberbagai aspek untuk kemudian dijadikan isu politik kurang maksimal lantaran aspek ideologi dan aspek organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **3. Strategi Partai**

Strategi partai dibutuhkan guna pencapaian tujuan jangka Panjang maupun jangka menengah dengan efektif. Strategi partai sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu :

- a. Strategi terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini dinilai penting dilakukan guna memenangkan kandidat dan partai politik yang bersangkutan. Melalui pemenangan suara, kandidat maupun partai politik dapat mengarahkan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan garis *platform* perjuangan partai.
- b. Strategi politik untuk berkoalisi dengan partai politik lain, cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis memenangkan Pemilu semata.
- c. Strategi politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik secara keseluruhan mulai dari strategi penggalangan dana partai, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan rekrutmen dan lain sebagainya.
- d. Strategi umum, berkaitan dengan upaya partai untuk bisa terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kemajuan zaman.

Dari berbagai strategi yang disebutkan di atas, PDI-P Jawa Tengah menurut Ketua DPD nya berfokus pada strategi umum karena merasa masih sulit untuk menyesuaikan ideologi dengan konteks ruang dan waktu yang

ada serta fokus pada pemberdayaan anggota dan kaderisasi. Selebihkan PDI-P Jawa Tengah mengikuti strategi yang telah dirumuskan oleh pusat.

#### **4. Kebijakan Partai**

Ideologi politik sejatinya akan tercermin dari kebijakan partai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. *Platform* partai menjadi tolok ukur yang penting dalam implementasi ideologi politik yang dimiliki partai. Cara partai politik dalam melihat, menganalisa dan mengajukan solusi atas permasalahan bangsa akan mencerminkan ideologi yang dianutnya.

“...Jawa Tengah menerapkan kebijakan internal untuk bangga menggunakan simbol-simbol PDI-P, jadi setiap ada agenda harus memakai PDH lengkap dengan identitas nama dan logo banteng. Terdapat *reward* dan *punishment* bagi setiap kader maupun anggota nantinya”<sup>15</sup>

PDI-P Jawa Tengah lebih banyak berfokus pada kebijakan internal DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi lantaran kebijakan partai secara umum sepenuhnya menjadi urusan pusat dan mengikat struktural dibawahnya sampai pada anak ranting partai. Kebijakan internal yang ada difokuskan pada aspek tertib organisasi dan sebagai usaha mencetak kader-kader militan yang mempunyai rasa bangga terhadap PDI-P itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara garis besar hambatan dalam materialisasi ideologi politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah melalui *platform*, isu politik, strategi dan kebijakan partai adalah pola pikir pengurus DPD

---

<sup>15</sup> Op.Cit. Hlm.77

PDI-P yang mengedepankan kerja kolektif. Akibat dari pola pikir tersebut adalah kerja fungsional sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada tidak berjalan.

Hal tersebut tidak terlepas dari orientasi kognitif yang lebih banyak berperan dalam menggambarkan pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. realitas yang terjadi bahwasanya pemahaman kader dan anggota tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada kesadaran diri tentang nilai marhaenisme dalam tindakan.

Selain itu pragmatisme politik yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah membuat suasana semakin menjauh dari wacana ideologi. Dasar perjuangan yang dianggap abstrak, sulit dicerna dan sulit diimplementasikan membuat kader dan anggota hanya berkuat pada hal-hal yang bersifat riil. Terlebih jika harus disandingkan dengan realitas terjebakanya para kader dan anggota dalam pemahaman semu yang mengaitkan ideologi dengan sifat fanatik serta otoriter. Semakin tinggi tekanan dalam persaingan politik membuat kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang terlibat di dalamnya hanya berorientasi pada cara-cara untuk mendapatkan suara dalam Pemilu, sementara permasalahan masyarakat jarang dibahas dan tidak terselesaikan.

### **3.4 Tantangan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah**

#### **3.4.1 Tantangan dari Dalam**

Kemampuan kader maupun anggota PDI-P Jawa Tengah dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan ideologis yang sesuai dengan perkembangan zaman masih sangat minim, usaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut sangat tinggi melalui Pendidikan dan pelatihan ideologi namun terhambat lantaran keterbatasan dana dalam pelaksanaannya.

Anggota maupun kader PDI-P Jawa Tengah baik yang ada di jabatan pemerintahan maupun yang tidak, rata-rata hanya memahami apa yang menjadi instruksi ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa memahami secara mendalam konteks ideologi yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diperjuangkan. Sehingga usaha dalam mematerialisasikan ideologi partai ke dalam kebijakan pemerintahan Jawa Tengah perlu proses yang lebih dalam. Karena partai harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemahaman anggota fraksi yang minim dalam aspek ideologi dan mereka cenderung hanya berfokus pada pragmatisme politik.

#### **3.4.2 Tantangan dari Luar**

Menurut penjelasan dari ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat merupakan tantangan tersendiri bagi partai. tantangan datang ketika usaha untuk memateriilkan ideologi harus selalu

diupayakan agar sesuai konteks ruang dan waktu yang ada. Sementara itu para kader dan anggota bahkan belum selesai dalam memahami ideologi partai dalam hal konseptual sehingga usaha pencapaian cita-cita perjuangan dinilai semakin berat dan membutuhkan usaha lebih.

Ideologi yang baik adalah ideologi yang berperan dalam kemajuan bangsa dan negara. Ideologi partai politik dalam hal ini marhaenisme dalam penerapannya di DPD PDI-P Jawa Tengah harus diterima dan difahami oleh kader dan anggota yang ada di dalamnya.